



**KPKNL**  
PALOPO

# LAPORAN KINERJA

## KPKNL PALOPO 2023



**IDAMAN**  
Ikhlās dan Andal dalam  
Melayani

## PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Palopo disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Palopo di tahun 2023 sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

LAKIN merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LAKIN KPKNL Palopo tahun 2023 disusun berdasar dan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan peraturan di atas, serta merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas upaya pencapaian Visi dan Misi DJKN yaitu Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan Misi Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan Negara; Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah; Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

LAKIN KPKNL Palopo Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada *Balance Score Card* (BSC) sebagai instrumen untuk mengukur kinerja KPKNL Palopo melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja KPKNL Palopo tahun 2023. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palopo berdasarkan pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 114,13% dari 10 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian target tersebut tentunya tidak lepas dari koordinasi, dukungan dan sinergi semua pihak baik di internal, maupun dengan semua *stakeholders* di lingkungan KPKNL Palopo.

Demikian LAKIN ini disusun dengan harapan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan, sekaligus merupakan pertanggungjawaban atas upaya pencapaian Visi dan Misi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban KPKNL Palopo khususnya di tahun 2023. LAKIN ini diharapkan dapat berperan sebagai sarana pembinaan, pengendalian, dan

pengevaluasian, serta penilaian kinerja secara kualitatif dan kuantitatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Palopo.

Akhir kata, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas integritas, pelayanan, profesionalisme, sinergi, dan semua upaya untuk mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan tugas, kepada segenap jajaran pegawai KPKNL Palopo. Kami juga berterima kasih atas segala saran, masukan dan kritik dari seluruh stakeholder sebagai salah satu upaya kami untuk memperbaiki layanan dan akuntabilitas kinerja di masa-masa mendatang.

Palopo, 08 Februari 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani Secara Elektronik

Naf'an Widiarso Rafid

**KPKNL PALOPO**  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO





## DAFTAR ISI

Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Tugas, Fungsi. Dan Struktur Organisasi .....	1
B. Peran Strategi KPKNL Palopo .....	6
C. Aspek Strategis Organisasi.....	7
D. Permasalahan Utama .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>10</b>
A. Rencana Strategis.....	10
B. Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>16</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	16
B. Realisasi Anggaran.....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
Lampiran .....	47



## IKHTISAR EKSEKUTIF

### A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

Akuntabilitas Kinerja KPKNL Palopo dalam mengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang, disampaikan kepada *stakeholder* melalui Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Palopo tahun 2023. LAKIN KPKNL Palopo tahun 2023 merupakan laporan pencapaian kinerja, dimana laporan tersebut menjadi bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi KPKNL Palopo yang merupakan unit vertikal DJKN yaitu :

*“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Kementerian Keuangan telah menetapkan kinerja berbasis *Balanced Scorecard (BSC)* untuk melengkapi Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999, yang selanjutnya menjadi sarana untuk mendukung pencapaian visi dan misi dalam rencana kerja KPKNL Palopo, dengan mengacu pada visi dan misi DJKN kedalam rencana kegiatan. Lakin KPKNL Palopo tahun 2022 terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan motto “IDAMAN, Ikhlas dan Andal dalam Melayani” segenap jajaran pegawai KPKNL Palopo bertekad untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKT



Tahun 2023 dengan penuh Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

## B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC), rata-rata tingkat pencapaian kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU yang merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) sasaran strategis Kemenkeu *Three* KPKNL tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	115,30%
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	120,00%
		1c-CP	Indeks Integritas	88,67	100,56%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	114,69%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	104,20%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	114,58%
		3b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	120,00%
		3c-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	100,00%
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	120,00%
		4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	120,00%



5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	106,38%
		5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	114,20%
		5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	120,00%
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	116,28%
7.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	7a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	99,75%
		7b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	120,00%
		7c-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	118,41%
8.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	8a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120,00%
9.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	9a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	120,00%
10.	Organisasi yang Fit for Purpose	10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	120,00%

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palopo berdasarkan pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 adalah **114,13%** dari 10 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).



## BAB I PENDAHULUAN

### A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palopo merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah, dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

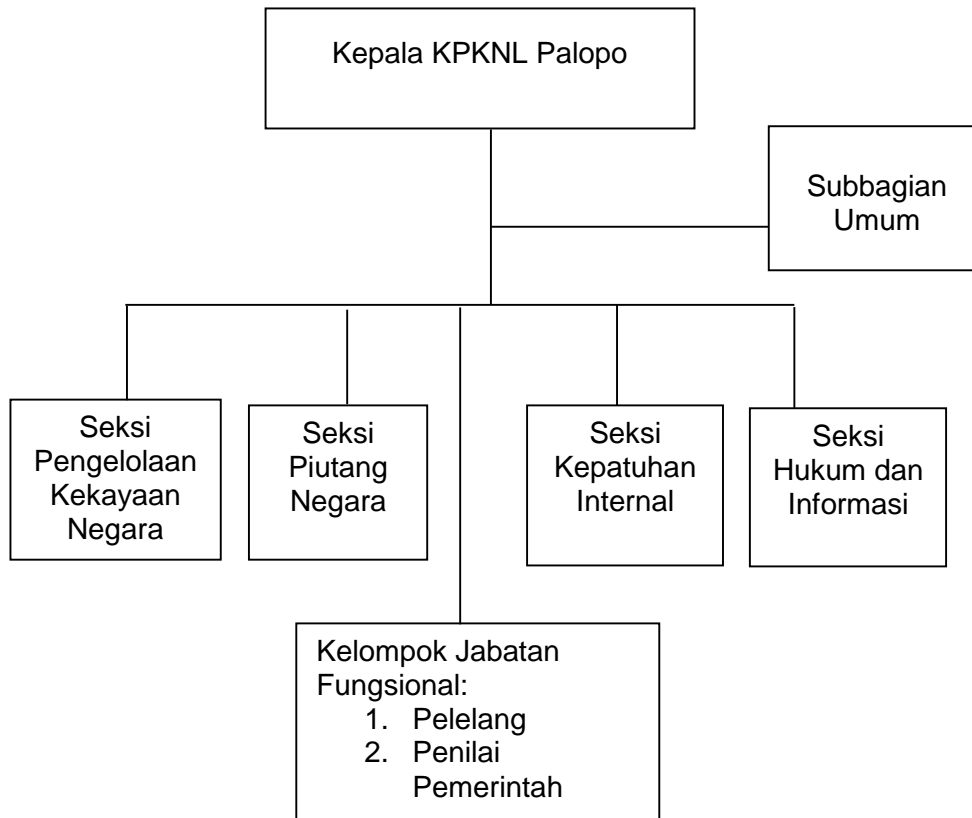
KPKNL Palopo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan Negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, KPKNL Palopo memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1 (satu) jabatan struktural eselon III.a (Kepala Kantor/Administrator), 5 (lima) Jabatan Struktural eselon IV.a (Kepala Subbag/Seksi) dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari 2 (dua) Fungsional Pelelang dan 3 (tiga) Fungsional Penilai Pemerintah, sebagaimana bagan berikut:



### Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo



Bagan tersebut memiliki penjelasan sebagai berikut:

1. **Sub Bagian Umum**, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL Palopo.
2. **Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan Daftar Barang Milik Negara/Kekayaan Negara, perhitungan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) BMN, penyusunan portofolio BMN, serta mengkoordinasikan kegiatan sertifikasi BMN berupa tanah dengan satker dan instansi terkait.
3. **Seksi Piutang Negara**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan



teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

4. **Seksi Hukum dan Informasi**, mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
5. **Seksi Kepatuhan Internal**, mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
6. **Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah**, mempunyai tugas menyusun konsep standar proses penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara, sumber daya alam, real properti, properti khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan Badan Hukum Pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek penilaian yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
7. **Jabatan Fungsional Pelelang**, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen objek lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penyusunan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, petikan, kutipan dan risalah lelang, serta penggalian potensi lelang.

Selain jabatan struktural dan fungsional di atas, KPKNL Palopo juga memiliki Juru Sita Piutang Negara sebanyak 2 (dua) orang, 1 (satu) orang Juru Sita merangkap pelaksana pada Subbagian Umum, sedangkan 1 (satu) orang lainnya juga menjabat Kepala Seksi Kepatuhan Internal.

KPKNL Palopo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang kepada pemangku kepentingan yang meliputi 7 (tujuh) wilayah kerja, yaitu :

1. Kota Palopo.
2. Kabupaten Luwu.
3. Kabupaten Luwu Utara.
4. Kabupaten Luwu Timur.
5. Kabupaten Tana Toraja.
6. Kabupaten Toraja Utara.



7. Kabupaten Enrekang.

Dalam menjalankan tugasnya, sampai dengan Desember 2023, KPKNL Palopo didukung oleh 21 (dua puluh satu) orang pegawai dari berbagai bidang keahlian dengan komposisi pegawai KPKNL Palopo berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, gender, dan umur adalah sebagai berikut:

Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan:

Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-Laki	-	2	13	2	17
Perempuan	-	2	2	-	4
<b>Total</b>	-	4	15	2	21

Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan Pendidikan:

No	Tingkat Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	SLTA	-	-	-	-	-
2.	DI	-	-	-	-	-
3.	DIII	-	4	1	-	5
4.	DIV	-	-	-	-	-
5.	S1	-	-	13	-	13
6.	S2	-	-	1	1	2
7.	S3	-	-	-	1	1
<b>TOTAL</b>		-	4	15	2	21

Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan Jabatan Fungsional:

No.	Jabatan fungsional	Jumlah
1	Pelelang	2
2	Penilai	3
<b>Total</b>		<b>5</b>



Pegawai KPKNL Palopo Berdasarkan Jabatan Fungsional Teknis:

No.	Jabatan fungsional teknis	Jumlah
1	PBJ	1
2	Pemeriksa Piutang Negara	1
3	Jurusita	2
<b>Total</b>		<b>3</b>

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan tugas pokok dan fungsi pada KPKNL Palopo merupakan alat penunjang yang diperlukan guna menjalankan kegiatan operasional kantor. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, KPKNL Palopo saat ini menempati sebagian (*sharing*) Gedung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo (utilisasi penggunaan BMN), yang terletak di Jalan Andi Kambo Nomor 55, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Berikut kondisi sarana dan prasarana KPKNL Palopo:

#### 1. Rumah Negara

Rumah Negara pada KPKNL Palopo berjumlah 8 (delapan) unit yang terdiri dari:

- 4 (unit) unit rumah negara terletak di Jalan K.H. Ahmad Razak, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara Kota Palopo;
- 1 (satu) unit rumah negara terletak di Jalan Sawerigading, Kelurahan Batu Pasi, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo;
- 3 (tiga) unit rumah negara terletak di Jalan Pongsimpin Lorong SD, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara Kota Palopo.

#### 2. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas Roda Empat dan Roda Dua di KPKNL Palopo berjumlah 10 (delapan) unit yang terdiri dari:

No.	KANTOR	RODA 2				RODA 4				TOTAL
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jml	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jml	
1	KPKNL Palopo	5	-	-	5	4	-	1	5	10



## B. PERAN STRATEGIS KPKNL PALOPO

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo sebagai organisasi yang bertugas melaksanakan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang mempunyai peran strategis dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:

### 1. Melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara

Peran strategis KPKNL Palopo di bidang pengelolaan BMN yaitu dengan cara melakukan optimalisasi pengelolaan BMN yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan Negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna BMN telah dilakukan dengan cara utilisasi kekayaan Negara (PSP, pemanfaatan, pemindahtanganan dan sebagainya), pengawasan dan pengendalian BMN, pembinaan, dan penatausahaan BMN. Dilakukan juga mekanisme untuk mengukur tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dibandingkan dengan perencanaan sesuai kebutuhan (SBSK), serta mekanisme untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja BMN melalui portofolio aset, serta mengkoordinasikan kegiatan sertifikasi BMN berupa tanah.

### 2. Penilaian Aset

Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara, penilaian mempunyai peranan penting dari proses pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan/atau BMN lain yang berada di lingkup Kementerian/Lembaga. Estimasi atau perkiraan nilai wajar tersebut dapat digunakan baik dalam rangka penyusunan LKPP dan/atau pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Selain itu, selama tahun 2023, KPKNL Palopo juga telah melaksanakan penilaian aset milik pemerintah daerah (BMD) yang berada di wilayah kerja KPKNL Palopo, baik dalam rangka penetapan nilai limit untuk penjualan lelang/pemindahtanganan, maupun dalam rangka penyusunan neraca keuangan daerah.

### 3. Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Palopo di bidang pegurusan piutang negara yaitu dalam rangka penyelamatan keuangan negara berupa piutang negara yang macet, baik yang berasal dari instansi pemerintah pusat maupun daerah, piutang eks perbankan, maupun non perbankan misalnya penyerahan piutang dari Kementerian/Lembaga.



4. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang merupakan sarana transaksi jual beli yang terbuka untuk umum. Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mengedepankan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. Dalam rangka memberikan pelayanan lelang, KPKNL Palopo terus melakukan upaya penggalian potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi. Keuntungan jual beli melalui lelang yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan memberikan kepastian hukum dengan adanya akta otentik berupa Risalah Lelang.

5. Memberikan Kontribusi kepada Negara berupa PNBPNBP

Dalam memberikan pelayanan di bidang pengurusan piutang negara dan lelang, KPKNL Palopo telah berkontribusi terhadap penerimaan negara khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Biaya Administrasi (Biad) dalam pengurusan piutang negara dan bea lelang dalam layanan lelang sesuai tarif yang diatur dalam Peraturan Perundangan. Sepanjang tahun 2023, KPKNL Palopo telah berperan memberikan kontribusi kepada negara berupa PNBPNBP sebagaimana uraian tersebut dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada secara optimal.

### C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki 4 tujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, KPKNL Palopo sebagai instansi vertikal di bawah naungan DJKN atau disebut juga kantor operasional dari Kantor Pusat DJKN, pada tahun 2023 telah menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan;
2. pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa;



3. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
4. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional;
5. Penerapan tata kelola kekayaan negara dan lelang yang efektif;
6. Pengawasan dan pengendalian kekayaan negara yang efektif;
7. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal;
8. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif;
9. Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif;
10. Organisasi yang *fit for purpose*.

#### D. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam mencapai tujuan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, terdapat beberapa hal yang menjadi isu utama yang dihadapi KPKNL Palopo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

No.	Tujuan Organisasi	Sasaran Strategis KPKNL Palopo	Isu Utama
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, inklusif dan berkelanjutan	Pengajuan pemanfaatan/sewa maupun pemindahtanganan/penjualan BMN masih terbatas
2.		Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak terjadi <i>potential loss</i> akibat lelang yang TAP, terutama pada lelang HT</li> <li>• Banyaknya lelang batal karena tidak terbitnya SKPT</li> <li>• Kendala pada aplikasi pembuatan SKPT karena <i>maintenance</i></li> </ul>
3.		Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	-
4.	Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien	Pelaksanaan Penilaian yang akuntabel dan profesional	-
5.	Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	-



6.	Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif dan efisien	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	-
7.		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	-
8.		Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	-
9.		Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	-
10.		Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	-

Namun demikian, dengan semangat “IDAMAN”, Ikhlas dan Andal dalam Melayani, KPKNL Palopo secara optimal memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang ada untuk dijadikan peluang yang menguntungkan, dan menjadikan permasalahan dan isu yang dihadapi sebagai suatu tantangan yang memacu KPKNL Palopo untuk bekerja lebih baik lagi di tahun mendatang.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Di samping itu, perencanaan strategis juga merupakan proses sistematis berkelanjutan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang ada saat ini atau berpotensi yang dimiliki.

Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, disusunlah Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Rencana strategis ini mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang realistis untuk dilaksanakan dalam periode tahun 2020-2024.

#### 1. VISI

DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai unit vertikal, visi KPKNL Palopo untuk tahun 2020-2024 mengacu pada visi DJKN 2020-2024 yaitu:

*“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*

Pada visi tersebut, profesional memiliki makna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah



pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pengelolaan kekayaan negara diharapkan dapat memiliki karakter kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan, dan adaptif. Penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Kontributif** berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional;
- b. **Instrumental** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif, dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi;
- c. **Otoritatif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset lain di level nasional dan internasional;
- d. **Berkelanjutan** diwujudkan melalui peningkatan tata kelola dan nilai tambah aset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum; dan
- e. **Adaptif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya.

## 2. MISI

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, DJKN telah menetapkan 5 (lima) misi, sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- 3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- 4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- 5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.



### 3. TUJUAN

Untuk mengimplemantasikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam kurun periode waktu tertentu serta menyelaraskan arah yang strategis sesuai dengan tugas dan fungsi, perlu adanya suatu tujuan. DJKN memiliki 4 tujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu:

- 1) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- 2) Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- 3) Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- 4) Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

### 4. SASARAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, DJKN menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
  - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
  - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
- 3) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
- 4) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
  - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
  - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - d. Komunikasi publik yang efektif.

## B. RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi di bawahnya, untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator



kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

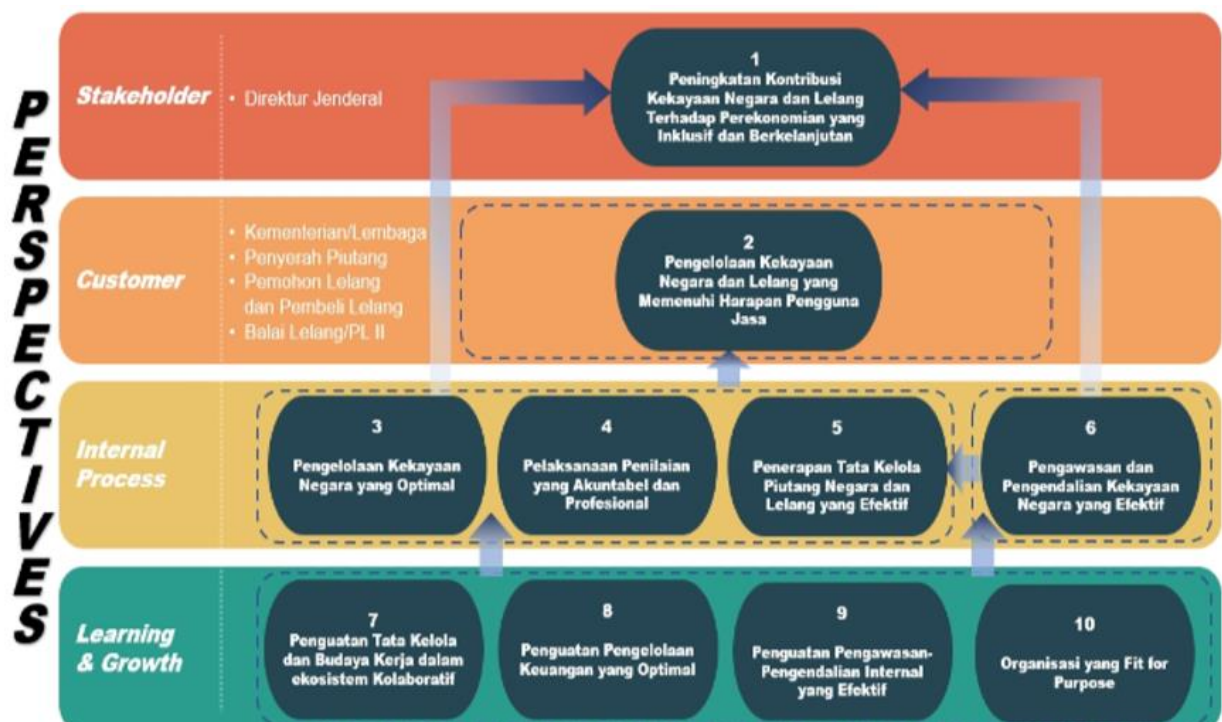
Perjanjian kinerja pada KPKNL Palopo menetapkan Sasaran Strategis (SS) beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur atas sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, KPKNL Palopo menetapkan 20 (dua puluh) IKU yang merupakan penjabaran dari 11 (sebelas) sasaran strategis Kemenkeu *Three* KPKNL tahun 2023. Perjanjian Kinerja di lingkup KPKNL Palopo nomor PK-04/WKN.15/2023 tanggal 31 Januari 2023 telah mengalami adendum sebanyak 1 (satu) kali. Adendum atas perjanjian kinerja yang dilakukan meliputi:

- a. Perubahan nama Sasaran Strategis;
- b. Perubahan nama IKU;
- c. Reposisi IKU antas Sasaran Strategis;
- d. Penghapusan IKU;
- e. Penambahan IKU;
- f. Perubahan *Trajectory* Target IKU; dan
- g. Perubahan kode IKU.

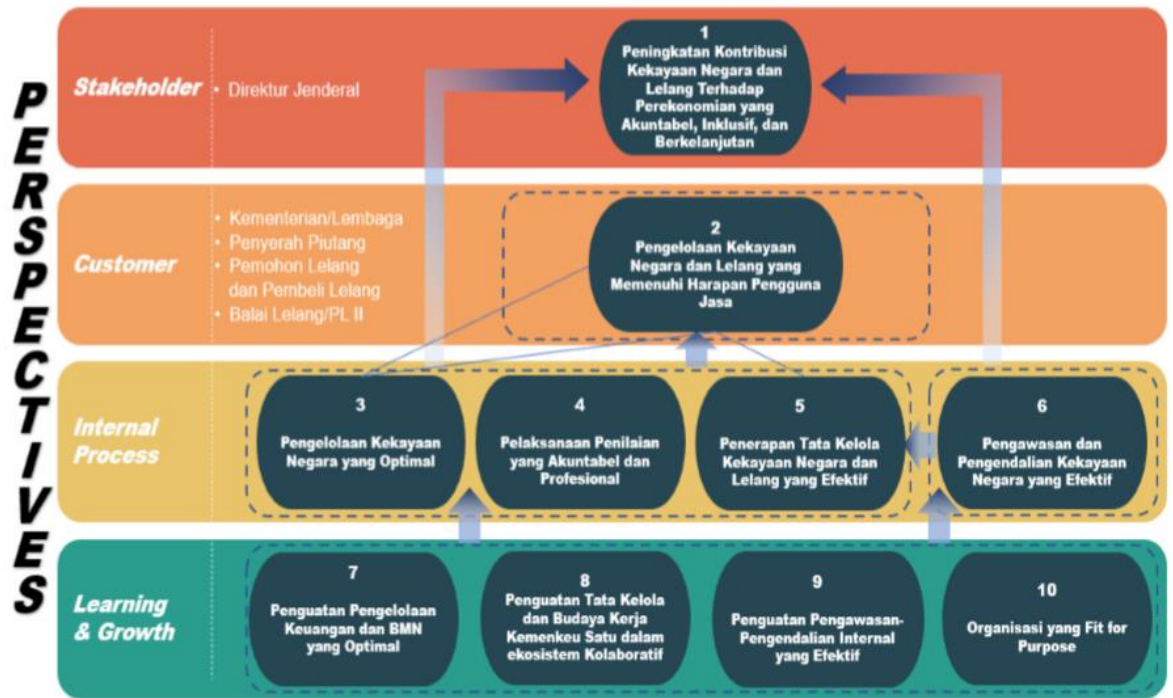
Rincian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPKNL Palopo tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### PETA STRATEGIS SEBELUM ADENDUM





PETA STRATEGIS SETELAH ADENDUM



No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%
		1c-CP	Indeks Integritas	88,67
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%
		3b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%



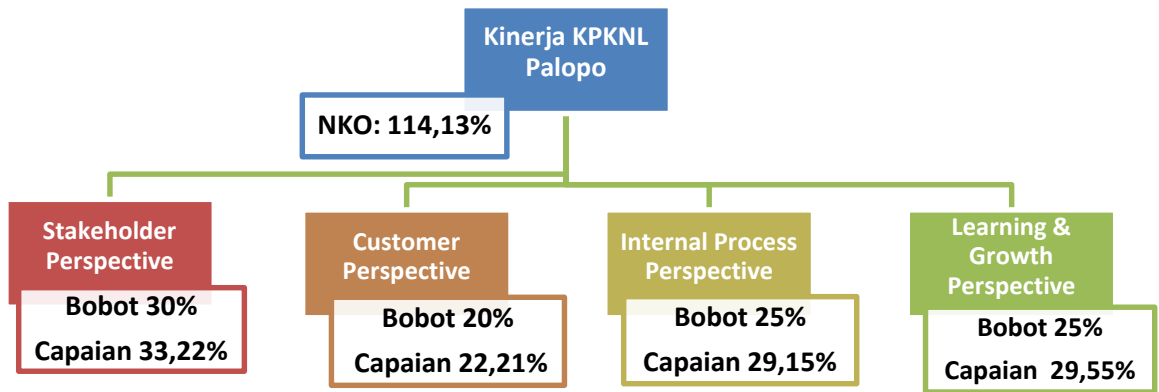
		3c-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%
		4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%
		5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%
		5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
7.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	7a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%
		7b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
		7c-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
8.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	8a-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
9.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	9a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60
10.	Organisasi yang Fit for Purpose	10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi KPKNL Palopo tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palopo tahun 2023 adalah sebesar 114,13 %. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada tiap perspektif sebagai berikut:



Berikut kami tampilkan tabel capaian IKU KPKNL Palopo tahun 2023:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Tanpa Batas	Max 120%
Stakeholder Perspective (30%)						33,22%
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase realisasi penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	115,30%	115,30%	115,30%
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	105,00%	131,25%	120%
		Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%	100,56%
Customer Perspective (20%)						22,21%



2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	114,69%	114,69%	114,69%
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	104,20%	104,20%	104,20%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	77,92%	114,58%	114,58%
		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	129,86%	129,86%	120,00%
		Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	100%	100%	100%
Internal Process Perspective (25%)						29,15%
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	0%	200,00%	120,00%
		Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif dan Efisien	70	87,19	124,55%	120,00%
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	100,00%	106,38%	106,38%
		Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	98,21%	114,20%	114,20%
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	126,35%	126,35%	120,00%
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	100,00%	116,28%	116,28%



Learning & Growth Perspective (25%)						29,55%
7.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	99,75	99,75%	99,75%
		Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15%	0%	200,00%	120,00%
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	118%	118,41%	118,41%
8.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pengelolaan kekayaan Negara	100%	120,00%	120,00%	120,00%
9.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	97,48	162,47%	120,00%
10.	Organisasi yang Fit For Purpose	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	97,23	121,54%	120,00%

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu *Three* KPKNL Palopo Tahun 2023, diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* KPKNL Palopo sebagai berikut:

**1. Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, inklusif dan berkelanjutan**

**Indikator Kinerja Utama :**

**1a-CP- Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang**

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1) PNPB Kekayaan Negara (PNPB BMN).

- a. penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen



Perbendaharaan.

- b. penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan

2) PNBPN Piutang Negara (PNBP PN).

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

3) PNBPN Lelang.

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- a. bea lelang,
- b. bea lelang pegadaian,
- c. denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,
- d. biaya permohonan lelang,
- e. penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi,
- f. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Untuk tahun 2023, kinerja penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang diakui apabila nilai penerimaan atas PNBPN Aset, PN, dan Lelang telah masuk ke rekening kas negara sesuai mata anggaran penerimaan yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang yaitu berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodifikasi Segmen Akun pada Bagian Akun Standar yang telah masuk dalam Aplikasi Online Monitoring SPAN.

Capaian IKU Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah sebagai berikut:

K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, inklusif dan berkelanjutan							
	1a-CP- Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	PoI/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	12,44%	28,36%	28,36%	47,99%	47,99%	115,30%	106,18%	
Capaian	<b>124,38%</b>	<b>94,53%</b>	<b>94,53%</b>	<b>79,99%</b>	<b>79,99%</b>	<b>115,30%</b>	<b>115,30%</b>	



Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. berkoordinasi dan mendorong satker untuk melakukan optimalisasi pengelolaan BMN terutama melalui pemanfaatan BMN yang belum digunakan untuk mendukung tugas.
- b. berkoordinasi dan mendorong satker untuk mengajukan penghapusan BMN kondisi rusak berat melalui lelang penjualan BMN.
- c. berkoordinasi dengan KPPN terkait untuk mendapatkan data realisasi PNPB aset pada Aplikasi OM SPAN.

Capaian penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai berikut.

Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2019	Rp3.060.733.638	Rp5.653.716.831
2020	Rp4.746.280.342	Rp3.374.521.822
2021	Rp3.419.008.679	Rp5.087.695.183
2022	Rp4.590.042.111	Rp4.873.519.708
2023	Rp5.455.040.267	Rp6.289.876.933

## 2. Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, inklusif dan berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama :

### 1b-CP- Presentase Produktivitas Lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, capaiannya tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Capaian IKU Persentase produktivitas lelang adalah sebagai berikut:

K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, inklusif dan berkelanjutan							
	1b-CP- Presentase Produktivitas Lelang							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	PoI/KP
Target	30%	45%	45%	80%	80%	80%	80%	MAX/TLK
Realisasi	37,34%	74,68%	74,68%	98,96%	98,96%	105%	105%	
Capaian	<b>124,47%</b>	<b>165,97%</b>	<b>165,97%</b>	<b>123,71%</b>	<b>123,71%</b>	<b>131,25%</b>	<b>131,25%</b>	



Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dengan calon pemohon lelang agar pemohon lelang memprioritaskan untuk mengajukan objek lelang yang *marketable*.
- 2) Melakukan penyampaian informasi pengumuman lelang kepada masyarakat agar mengikuti lelang melalui berbagai saluran media informasi termasuk media sosial.
- 3) Membuat database nilai wajar BMN dan harga lelang BMN tersebut agar hasil penilaian yang dijadikan dasar persetujuan penjualan BMN dapat mencerminkan nilai wajar/pasar yang sebenarnya.

Berikut adalah capaian Persentase produktivitas lelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Persentase Produktivitas Lelang		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2019	30%	32,01%
2020	34%	36%
2021	35%	37%
2022	36%	56%
2023	80%	105%

### 3. Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, inklusif dan berkelanjutan

**Indikator Kinerja Utama :**

#### **1c-CP- Indeks Integritas**

Realisasi dari IKU ini merupakan realisasi secara nasional, yaitu sebesar 89,17 dari target 88,67, sehingga perolehan IKU tidak mencerminkan nilai indeks per unit. Namun demikian, KPKNL Palopo berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa sehingga diharapkan dapat menyumbang kenaikan capaian indeks integritas secara nasional di tahun 2024 dari capaian tahun ini.



Capaian IKU Indeks Integritas adalah sebagai berikut:

K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, inklusif dan berkelanjutan							
	1c-CP- Indeks Integritas							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	PoI/KP
Target						88,67	88,67	MAX/TLK
Realisasi						89,17	89,17	
Capaian						100,56%	100,56%	

#### 4. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Indikator Kinerja Utama :

##### 2a-CP- Persentase realisasi pokok lelang

Persentase pokok lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Capaian IKU Persentase realisasi pokok lelang adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP- Persentase realisasi pokok lelang							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	PoI/KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	MAX/T LK
Realisasi	18,20%	43,04%	43,04%	66,42%	66,42%	114,69%	114,69%	
Capaian	90,99%	107,60%	107,60%	94,88%	4,88%	114,69%	114,69%	



Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi terkait permohonan lelang online;
- b. Melakukan penggalan potensi lelang kepada calon pemohon lelang yaitu perbankan, pemda, dan satker di lingkungan KPKNL Palopo.

Capaian Persentase realisasi pokok lelang dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai berikut.

Realisasi Pokok Lelang		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2019	Rp 63.120.500.000	Rp 66.534.187.328
2020	Rp 73.710.000.000	Rp 67.524.349.619
2021	Rp 70.000.000.000	Rp 142.129.640.255
2022	Rp 87.000.000.000	Rp 105.334.056.964
2023	Rp 110.687.000.000	Rp 126.943.641.893

## 5. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

**Indikator Kinerja Utama :**

### 2b-CP- Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Target untuk Tahun 2023 ini adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi mengalami adendum sehingga berubah menjadi Rp117.200.000,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah). Data capaian penurunan outstanding piutang Negara diperoleh dari Aplikasi FocusPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penjumlahan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT):
  - a. Angsuran
  - b. Penarikan/Pengembalian
  - c. Pelunasan
  - d. PSBDT
2. Keringanan hutang terhadap BKPN yang lunas pada tahun berjalan.

Capaian IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara adalah sebagai berikut:



K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP- Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Po/K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	41,87%	46,91%	46,91%	116,12%	116,12%	104,20%	104,20%	
Capaian	<b>418,68%</b>	<b>156,35%</b>	<b>156,35%</b>	<b>193,54%</b>	<b>193,54%</b>	<b>104,20%</b>	<b>104,20%</b>	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- mensosialisasikan secara massif terkait adanya crash program piutang Negara melalui berbagai sarana.
- melakukan koordinasi dalam rangka konsolidasi data dan dokumen dengan penyerah piutang.
- melakukan kegiatan penagihan langsung kepada debitur.

Capaian penurunan outstanding piutang negara dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai berikut.

Penurunan Outstanding Piutang Negara		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2019	Rp50.000.000	Rp411.453.430
2020	Rp45.000.000	Rp61.380.421
2021	Rp51.538.654	Rp356.433.551
2022	Rp37.150.000	Rp74.551.976
2023	Rp 117.200.000	Rp 122.119.754

## 6. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

### Indikator Kinerja Utama :

#### 3a-CP- Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Komponen kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK terdiri dari:

- Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023 yaitu pengukuran tingkat penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk existing luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sesuai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023.



- b. Optimalisasi Objek Hasil Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023 yaitu melakukan pengukuran tingkat optimalisasi terhadap BMN Objek Hasil Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023.

Capaian IKU Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	3a-CP- Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Po/K P
Target		50%	50%	55%	55%	68%	68%	MAX/ TLK
Realisasi		82,26%	82,26%	81,15%	81,15%	77,92%	77,92%	
Capaian		<b>164,51%</b>	<b>164,51%</b>	<b>147,55%</b>	<b>147,55%</b>	<b>114,58%</b>	<b>114,58%</b>	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens dengan satker-satker di wilayah kerja KPKNL Palopo guna memberikan edukasi yang memadai terkait pelaksanaan pengukuran tingkat penggunaan BMN sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN.
- melakukan pendampingan dalam pengisian formulir pendataan bagi satker yang menjadi target pengukuran kesesuaian BMN dengan SBSK.

Perbandingan capaian/realisasi tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dalam kurun waktu empat tahun terakhir sebagai berikut.

Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan SBSK		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2020	102%	102%
2021	62%	100%
2022	65%	75,08%
2023	68%	77,92%



## 7. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Indikator Kinerja Utama :

### 3b-CP- Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah untuk tahun 2023 terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- a. Target/Realisasi nominatif sejumlah 9 bidang tanah;
- b. Target/Realisasi Belum Bersertifikat Sesuai Ketentuan (BBSK) sejumlah 46 bidang tanah.

Tahapan dalam pelaksanaan IKU sertifikasi BMN adalah sebagai berikut:

- 1) Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat, serta bersertifikat namun belum sesuai ketentuan (BBSK), misalnya belum atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian/Lembaga;
- 2) Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat dan/atau BBSK. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat dan/atau BBSK pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik;
- 3) Penyusunan data BMN belum bersertifikat dan/atau BBSK yang diperkirakan dapat diselesaikan;
- 4) K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan;
- 5) Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertipikatkan sesuai ketentuan;
- 6) Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan;

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2023 adalah sampai dengan tahapan pelaksanaan sertifikasi dan/atau bersertifikat sesuai ketentuan, atas bidang tanah BMN yang menjadi target.

Capaian IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	3b-CP- Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	PoI/KP
Target		40%	40%	60%	60%	100%	100%	MAX/TL K
Realisasi		22,26%	22,26%	155,71%	155,71%	129,86%	129,86%	
Capaian		<b>55,65%</b>	<b>55,65%</b>	<b>259,51%</b>	<b>259,51%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	



Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi secara intens dengan kantor-kantor pertanahan terkait yang berada dalam wilayah kerja KPKNL Palopo.
- b. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi tanah secara rutin dengan pihak kantor pertanahan dan satker.

Capaian Bidang tanah BMN yang disertifikatkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai berikut.

Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2019	16	16
2020	106	106
2021	442	507
2022	55	194
2023	730	948

## 8. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Indikator Kinerja Utama :

### 3c-CP- Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

IKU Persentase Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dengan total BKPN target tahun 2023 adalah 4 berkas, tetapi selanjutnya dilakukan adendum sehingga menjadi 5 berkas.

Capaian IKU Persentase Penyelesaian BKPN adalah sebagai berikut.

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	3c-CP- Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	PoI/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	25%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	<b>250%</b>	<b>166,67%</b>	<b>166,67%</b>	<b>166,67%</b>	<b>166,67%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	



Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) mensosialisasikan secara massif terkait adanya crash program piutang Negara melalui berbagai sarana.
- 2) melakukan koordinasi dalam rangka konsolidasi data dan dokumen dengan penyerah piutang.
- 3) melakukan kegiatan penagihan langsung kepada debitur.

Capaian Efektifitas Penyelesaian BKPN dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai berikut.

Persentase Penyelesaian BKPN		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2019	16	17
2020	8	9
2021	12	23
2022	3	5
2023	5	5

## 9. Sasaran Strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

### Indikator Kinerja Utama :

#### 4a-CP- Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian, nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.



Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Target Deviasi ketergunaan hasil penilaian tahun 2023 adalah 25%. Capaian IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	4a-CP- Deviasi ketergunaan hasil penilaian							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	PoI/KP
Target	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	MAX/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	<b>200%</b>	<b>200%</b>	<b>200%</b>	<b>200%</b>	<b>200%</b>	<b>200%</b>	<b>200%</b>	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan proses penilaian BMN sesuai dengan standar dan ketentuan penilaian;
- 2) Melakukan pembinaan kepada satker terkait usulan nilai taksiran harga yang dijadikan usulan dalam rangka permohonan penghapusan BMN dan pemanfaatan BMN.

Capaian Deviasi ketergunaan hasil penilaian dalam kurun waktu empat tahun terakhir sebagai berikut.

Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2020	30%	0%
2021	22%	0,23%
2022	19%	0%
2023	25%	0%

#### 10. Sasaran Strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Indikator Kinerja Utama :

##### 4b-CP- Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup pelayanan penilaian yang diukur adalah pelayanan penilaian dalam rangka



pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD).

K-Wide	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	4b-CP- Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	PoI/KP
Target	70%	70	70	70	70	70	70	MAX/TLK
Realisasi	126,19%	87	87	88,25	88,25	87,19	87,19	
Capaian	<b>180,27%</b>	<b>124,31%</b>	<b>124,31%</b>	<b>126,07%</b>	<b>126,07%</b>	<b>124,55%</b>	<b>124,55%</b>	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan proses pelayanan penilaian BMN sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
- 2) Melakukan pembinaan kepada satker terkait prosedur pelayanan penilaian di KPKNL Palopo.

#### 11. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif Indikator Kinerja Utama:

##### 5a-CP- Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction*

*E-auction* adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. *E-auction* ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturannya harga lelang. Target IKU ini untuk tahun 2023 adalah sebesar 94%.

Implementasi *e-auction* meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*).



Capaian IKU Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	5a-CP- Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Poi/KP
Target	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	MAX/T LK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	<b>106,38%</b>	<b>106,38%</b>	<b>106,38%</b>	<b>106,38%</b>	<b>106,38%</b>	<b>106,38%</b>	<b>106,38%</b>	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo selalu mengedukasi dan mendorong kepada pemohon lelang, agar pelaksanaan lelang dilakukan secara *e-auction*, memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Penggunaan sarana *e-auction* ini dapat memberikan banyak manfaat, di antaranya calon pembeli bisa melakukan penawaran secara lebih fleksibel di mana saja, lebih transparan dan lebih aman.

Capaian Persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai berikut.

Persentase Pelaksanaan Lelang E-auction dan E-conventional Auction		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2019	85%	98,48%
2020	90%	100%
2021	92%	100%
2022	92%	100%
2023	86%	98%

## 12. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif Indikator Kinerja Utama :

### 5b-CP- Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online

Selama 2023, jumlah permohonan lelang online sebanyak 246 dan jumlah permohonan lelang sebanyak 250. Pengelolaan lelang yang semakin modern ini diharapkan dapat berpengaruh pada kenaikan tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang. Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online adalah sebagai berikut:



K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	5b-CP- Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	PoI/KP
Target	20%	40%	40%	63%	63%	84%	84%	MAX/TLK
Realisasi	116,28%	97,14%	97,14%	97,54%	97,54%	198,21%	198,21%	
Capaian	<b>581,40%</b>	<b>242,85%</b>	<b>242,85%</b>	<b>154,83%</b>	<b>154,83%</b>	<b>114,20%</b>	<b>114,20%</b>	

### 13. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif Indikator Kinerja Utama :

#### 5c-CP- Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Capaian IKU Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	5c-CP- Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	PoI/KP
Target	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	19,61%	80,39%	80,39%	191,37%	191,37%	136,35%	136,35%	
Capaian	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) melakukan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan terhadap satker yang BMN-nya menjadi target pengukuran evaluasi kinerja BMN.
- 2) melakukan asistensi/pendampingan kepada satker dalam pengisian formulir pendataan.
- 3) melakukan survei lapangan dalam rangka pengukuran evaluasi kinerja BMN (portofolio aset).



#### 14. Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif Indikator Kinerja Utama

##### 6a-CP- Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Capaian IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara adalah:

K-Wide	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	6a-CP- Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	PoI/KP
Target		50%	50%			86%	86%	MAX/TLK
Realisasi		100%	100%			100%	100%	
Capaian		<b>120%</b>	<b>120%</b>			<b>116,28%</b>	<b>116,28%</b>	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) selalu mengingatkan kepada satker yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan BMN, baik pemindahtanganan maupun pemanfaatan, untuk segera meindaklanjuti persetujuan tersebut sebelum jangka waktu persetujuan lewat waktu (daluwarsa), baik secara formal melalui surat maupun secara informal.
- 2) Membuat database rekapitulasi persetujuan pengelolaan BMN dan tindak lanjut yang telah satker lakukan antara lain berupa permohonan lelang untuk penjualan BMN, bukti setor PNBP sewa dan perjanjian sewa aset untuk pemanfaatan BMN.

Capaian Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai berikut.

Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2019	50%	96%
2020	80%	97%
2021	85%	96%
2022	85%	93%
2023	86%	98%



## 15. Sasaran Strategis Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

### Indikator Kinerja Utama

#### 7a-CP- Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian, yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Target IKU ini untuk tahun 2023 adalah 99,75%.

K-Wide	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	7a-CP- Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	PoI/KP
Target	95,5	95,5	95,5	100	100	100	100%	MAX/TL K
Realisasi	114,6	114,6	114,6	120	120	99,75	100%	
Capaian	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>99,75%</b>	<b>100%</b>	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Membuat rencana penarikan dana dan rencana kegiatan dengan cermat.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyerapan anggaran dan capaian output secara rutin.
- 3) Melakukan monitoring capaian IKPA pada aplikasi OM SPAN.
- 4) Melakukan koordinasi dengan KPPN Palopo terkait progres capaian IKPA.

Berikut adalah capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2019	95%	98%
2020	95%	95%
2021	95%	94%
2022	96%	92%
2023	100%	100%



## 16. Sasaran Strategis Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

### Indikator Kinerja Utama

#### 7b-CP- Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP: 425782 dan 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Target Deviasi PNBP dari Pengurusan Piutang dan Deviasi PNBP dari Bea Lelang masing-masing adalah 15%.

Capaian IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	7b-CP- Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	PoI/KP
Target	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	MAX/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah membuat dan menggunakan aplikasi internal (SIKASIH) dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi sederhana berbasis *google spreadsheet*, yang berfungsi mempermudah proses koordinasi dan rekonsiliasi antara tugas bendahara penerima yang manatausahakan rekening penampungan, dengan pendapatan PNBP dari lelang dan pengurusan piutang negara yang dilakukan pencatatan pada Subbagian Umum.

Capaian Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebagai berikut.



Deviasi Data PNBPFungsional DJKN		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2021	12,50%	0%
2022	10%	0%
2023	15%	0%

## 17. Sasaran Strategis Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

### Indikator Kinerja Utama

#### 7c-N- Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

IKU Persentase kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan bertujuan untuk mengukur kualitas pengelolaan BMN eksisting pada unit kerja dan mengukur kualitas pengadaan BMN pada unit kerja. Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan BMN berfokus pada 2 komponen penilaian yaitu pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. Kualitas pengelolaan BMN diukur dari Indeks Pengelolaan Aset (IPA), yang terdiri dari komponen Temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP, ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, tindak lanjut pengelolaan BMN, persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN, dan persentase BMN yang memiliki dokumen kepemilikan, serta persentase validitas dan completeness Master Aset.

Tingkat kualitas pengadaan BMN berfokus pada pencapaian ITKP yang diukur oleh LKPP. Target IKU Persentase kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan tahun 2023 adalah 100%.

Capaian IKU Persentase kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan sebagai berikut:

K-Wide	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
	7c-N- Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	PoI/KP
Target						100	100	MAX/TLK
Realisasi						100	100	
Capaian						100%	100%	

KPKNL Palopo berupaya untuk menjaga kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dengan senantiasa melaksanakan pengelolaan dan pengadaan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas manfaat, efektif dan efisien serta memperhatikan prinsip dalam pengadaan yaitu tepat waktu, tepat guna dan tepat hasil.



## 18. Sasaran Strategis Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

### Indikator Kinerja Utama

#### 8a-N- Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya (IDP).

Capaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	8a-N- Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	84%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	

Dalam pencapaian target IKU ini, KPKNL Palopo telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Membuat database terkait rekapitulasi data diklat/KLC yang telah diikuti oleh para pegawai;
- Selalu mengingatkan para pegawai untuk mengisi usulan diklat salah satunya pada saat dilakukan DKI;
- Selalu mendorong pegawai untuk mengikuti diklat/KLC dalam rangka pengembangan kompetensi setiap pegawai.

Capaian persentase pengembangan kompetensi pegawai dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai berikut.

Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2019	87%	100%
2020	100%	120%
2021	100%	120%
2022	100%	120%
2023	84%	120%



## 19. Sasaran Strategis Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif

### Indikator Kinerja Utama

#### 9a-N- Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif tercapai pada angka 97,48 dari target 60. Perolehan angka indeks akhir maksimal sebesar 120%. Paramater dari perhitungan formulasi IKU sangat beragam dan lebar.

Capaian IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif adalah sebagai berikut:

K-Wide	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
	9a-N- Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	PoI/KP
Target						60	60	MAX/TLK
Realisasi						97,48	97,48	
Capaian						120%	120%	

## 20. Sasaran Strategis Organisasi yang *Fit for Purpose*

### Indikator Kinerja Utama

#### 10a-N- Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi. Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi.

Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja, program pengembangan SDM dan kualitas kerja, alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja, mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat, serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.



Capaian IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

K-Wide	Organisasi yang <i>Fit for Purpose</i>							
	10a-N- Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Po/K P
Target						80	80	MAX/ TLK
Realisasi						97,23	97,23	
Capaian						120%	120%	

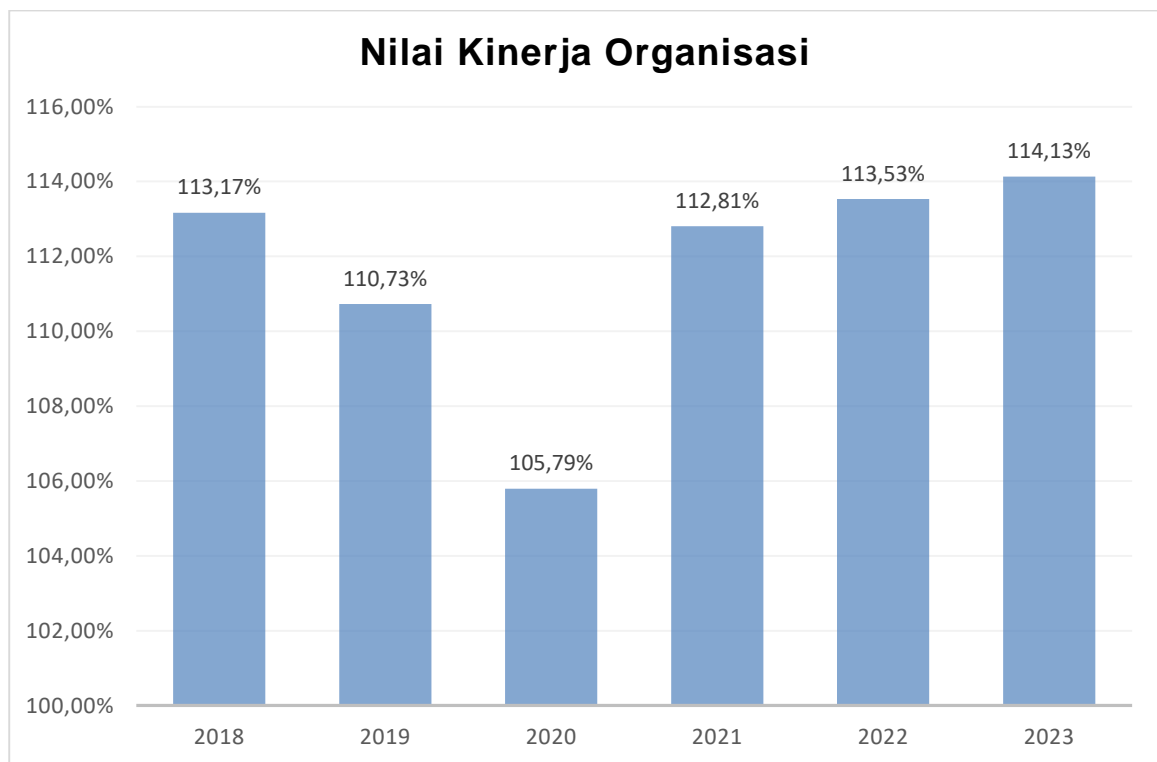


### Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO adalah nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palopo tahun 2023 adalah sebesar **114,13%**.

NKO pada tahun 2023 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini melanjutkan tren kenaikan NKO yang dicapai sejak 2021. Capaian NKO pada tahun 2023 merupakan nilai tertinggi yang berhasil dicapai dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi dalam kurun waktu enam tahun terakhir sebagai berikut.





## **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

1. Kuasa Pengguna Barang belum sepenuhnya tertib dan berdisiplin serta bertanggung jawab dalam menyelenggarakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara.

Kondisi tersebut coba diatasi oleh KPKNL Palopo dengan melakukan sosialisasi, komunikasi, dan pendampingan secara intens, tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penatausahaan dan pengelolaan BMN, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran bagi Kuasa Pengguna Barang dan jajarannya untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik dalam pengelolaan BMN.

2. Masih terdapat Barang Milik Negara bermasalah, yang meliputi Barang Milik Negara belum memiliki dokumen kepemilikan, Barang Milik Negara dikuasai pihak lain, Barang Milik Negara dalam sengketa, Barang Milik Negara belum ditemukan, Barang Milik Negara yang belum dioptimalkan penggunaannya, dan Barang Milik Negara rusak berat tetapi belum dihapuskan.

Terhadap hal tersebut, KPKNL Palopo berusaha mengedukasi para satker. Misalnya terkait BMN yang belum memiliki dokumen kepemilikan, agar segera diikutkan program sertifikasi terutama untuk yang *clean and clear*, sedangkan untuk yang dikuasai atau terdapat sengketa dengan pihak lain, satker perlu intens berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan status aset. Adapun terhadap BMN yang belum optimal penggunaannya, KPKNL Palopo mendorong untuk optimalisasi penggunaannya atau dengan cara melaksanakan pemanfaatan apabila aset tersebut belum digunakan untuk mendukung tugas. Sedangkan terhadap BMN rusak berat yang belum dihapuskan, KPKNL Palopo mendorong satker untuk melakukan inventarisasi BMN kondisi rusak berat atau tidak lagi ekonomis bila digunakan untuk mendukung tugas satker, agar segera diajukan permohonan penghapusannya kepada KPKNL.

3. Pelaksanaan program sertifikasi Barang Milik Negara berupa tanah terkendala oleh data tanah target sertifikasi (riwayat, lokasi, dan batas-batas tanah) belum tersedia secara lengkap dan valid. Begitu juga dengan dokumen legal formal terkait perolehan BMN berupa tanah, terkadang satker tidak menguasai/memiliki dokumen-dokumen tersebut secara memadai.

Terhadap permasalahan ini KPKNL Palopo melakukan pendampingan kepada satker, mulai dari tahap verifikasi dokumen awal, proses koordinasi dengan pihak pertanahan, sampai dengan terbitnya sertipikat atas BMN.



4. Pemahaman peraturan yang tidak merata maupun tidak memadai, baik di sisi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Pengelola Barang, sehingga sering terjadi penafsiran yang berbeda.

KPKNL Palopo melakukan *knowledge sharing* baik secara internal, maupun kepada eksternal/stakeholder berkenaan dengan dinamisasi regulasi terkait pengelolaan BMN, sehingga harapannya terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam menerjemahkan peraturan yang ada.

5. Dukungan teknologi informasi/aplikasi di bidang pengelolaan kekayaan negara belum dimanfaatkan secara optimal oleh *stakeholder*.

Kondisi tersebut biasanya dilatarbelakangi keterbatasan SDM yang ada di satker, baik secara jumlah, ataupun secara kapasitas. Terkait dengan hal tersebut, KPKNL selalu siaga melakukan pendampingan maupun memberikan layanan konsultasi bagi satker yang membutuhkan bantuan.

6. Terdapat debitur yang tidak diketahui keberadaannya karena menetap di luar negeri dan barang jaminan milik debitur tidak dapat dilakukan sita, serta terdapat beberapa debitur yang tidak kooperatif ketika ditagih.

KPKNL Palopo telah melakukan dan mengedepankan upaya-upaya pendekatan secara persuasif kepada debitur dalam rangka melakukan penagihan. KPKNL juga intens melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait dengan kondisi barang jaminan. KPKNL juga secara massif dan persuasif mensosialisasikan adanya program keringanan utang bagi debitur yang memenuhi persyaratan, sehingga dampaknya terdapat debitur yang mengikuti program keringanan utang dan melunasi kewajiban-kewajibannya.

7. Pihak penjual menetapkan nilai limit di atas nilai wajar sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama agar objek lelang terjual. Biasanya hal tersebut dilatarbelakangi motif penjual yang mengajukan lelang hanya untuk melakukan *shock therapy* agar debitur bersedia melakukan pembayaran.

KPKNL Palopo berupaya untuk melakukan komunikasi kepada penjual dalam hal ini pihak kreditur (perbankan dan koperasi) untuk dapat memprioritaskan pengajuan lelang yang memiliki potensi pembeli.

8. Objek lelang masih dihuni oleh debitur (pihak tereksekusi) sehingga masyarakat tidak berminat atas lelang dimaksud (objek lelang belum *clean and clear*).

KPKNL Palopo telah melakukan publikasi melalui berbagai media baik secara daring maupun secara langsung kepada masyarakat bahwa jual beli melalui lelang di KPKNL secara prinsip adalah *as is* atau apa adanya sebagaimana kondisi fisiknya. Oleh karena itu,



calon pembeli disarankan untuk mengecek kondisi barang sebelum mengikuti lelang, bisa dilakukan pada tahap *anwijizing* atau secara mandiri. Namun demikian, KPKNL juga menyampaikan bahwa walaupun secara fisik *as is*, tetapi secara dokumen formil telah dilakukan verifikasi oleh Pelelang, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi calon pembeli. Pelaksanaan lelang juga berjalan secara lebih *fair* dan transparan karena dilakukan secara online (e-auction).

9. Masyarakat masih menggunakan lelang sebagai sarana jual beli sebatas untuk digunakan atau dipakai (*end user*) dan belum sampai tahap investasi.

KPKNL Palopo di berbagai kesempatan, baik melalui sarana komunikasi online maupun dalam pertemuan dengan para stakeholder, berupaya untuk terus mensosialisasikan bahwa jual beli melalui lelang dapat menjadi sarana investasi yang menguntungkan di masa depan.

## **RENCANA KERJA KPKNL PALOPO 2024**

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2023, target yang diharapkan dapat dicapai tahun 2024 serta mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, dan kebutuhan dan harapan pengguna layanan, KPKNL Palopo memiliki rencana kerja tahun 2024 sebagai berikut:

### **1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara**

- a. Melakukan bimtek untuk satker terkait dengan pelaksanaan pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK serta terkait implementasi portofolio aset, baik melalui media daring maupun luring.
- b. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif, termasuk dalam hal mendorong satker untuk optimalisasi penggunaan aset, maupun melalui pemanfaatan aset.
- c. Percepatan sertifikasi BMN, dengan melakukan pendampingan kepada satker, dari awal tahap proses sertifikasi hingga proses selesai, serta mengintensifkan komunikasi dalam rangka koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
- d. Meningkatkan pemahaman peraturan baik di internal maupun eksternal melalui internalisasi kepada pegawai dan sosialisasi kepada stakeholder.

### **2. Peningkatan pelayanan penilaian**

- a. Meningkatkan kualitas, kemampuan, wawasan penilai dengan mengikuti pendidikan/pelatihan, diskusi berkala, *knowledge sharing* di bidang penilaian.
- b. Menjalin komunikasi yang baik dengan *stakeholder* guna meminimalisasi kendala dalam pelaksanaan penilaian.



- c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna memperoleh data/informasi/transaksi (harga) tanah/bangunan yang mereka miliki, serta mengumpulkan data-data transaksi atau penawaran tanah di lingkungan wilayah kerja KPKNL Palopo, untuk selanjutnya dapat dibuat database guna melengkapi DKPB yang telah disusun.
- d. Melaksanakan penilaian yang berkualitas sesuai dengan tenggat waktu dan keakuratan dalam penilaian.

### **3. Optimalisasi pengurusan piutang negara**

- a. Melakukan koordinasi secara intensif dengan penyerah piutang, terkait dengan adanya kendala dalam proses pengurusan piutang atas BKPN yang ada.
- b. Melakukan penggalian potensi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan penyerah piutang lainnya.
- c. Memaksimalkan proses penagihan dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif.
- d. Mensosialisasikan secara massif mengenai adanya *crash program* piutang negara tahun 2023 melalui berbagai kanal media.

### **4. Peningkatan pelayanan lelang**

- a. Penggalian potensi lelang untuk seluruh jenis lelang di wilayah kerja KPKNL Palopo antara lain kepada instansi-instansi pemerintah, BUMN/BUMD, pengadilan, ataupun pihak swasta untuk lelang eksekusi maupun non eksekusi. Guna mendukung strategi tersebut akan dilakukan :
  - 1. Peningkatan kompetensi pegawai dalam penggalian potensi lelang dengan pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta pengguna layanan.
  - 2. Pembuatan database pelaksanaan lelang dan pemeliharaan data yang berkelanjutan di wilayah kerja KPKNL Palopo.
- b. Sosialisasi penggunaan dan pelaksanaan lelang melalui [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) kepada *stakeholder* melalui saluran-saluran media yang tersedia.
- c. Meningkatkan kompetensi Pejabat Lelang (dhi. Jafung Pelelang), dengan mengikuti *capacity building*, pendidikan/pelatihan dan *knowledge sharing* bagi Pejabat Lelang.



- 5. Konsisten menerapkan kriteria kantor yang berpredikat Zona Integritas WBK sekaligus mempersiapkan diri untuk menuju Zona Integritas WBBM tahun 2025**
- a. Konsisten menerapkan pola pikir dan budaya kerja yang bebas dari korupsi, dengan mengutamakan prinsip pelayanan berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh segenap jajaran pegawai ASN di lingkungan KPKNL Palopo, baik ASN PNS maupun non PNS.
  - b. Melakukan publikasi yang optimal mengenai pembentukan zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani KPKNL Palopo kepada stakeholder melalui berbagai media informasi baik cetak, melalui spanduk/pamflet maupun secara elektronik, misalnya melalui media sosial.
  - c. Inovasi atas layanan unggulan kepada *stakeholder*, baik inovasi berupa pemangkasan waktu layanan, maupun inovasi program berbasis kegiatan, atau berbasis penggunaan media aplikasi.
  - d. Membuka layanan pengaduan atau kotak saran dan masukan atas kinerja KPKNL Palopo baik secara fisik, maupun melalui media elektronik.
  - e. Menjalin *closer engagement* dengan stakeholder pengguna layanan melalui berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan, baik secara online maupun offline.



## B. Realisasi Anggaran

Pengelolaan keuangan diarahkan pada efisiensi pengeluaran dan penggunaan dana seoptimal mungkin. Berdasarkan data yang ada, sampai dengan 31 Desember 2023 terhitung realisasi belanja unit KPKNL Palopo pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp 1,414,186,030** atau **94,49%** dari total pagu revisi dalam DIPA KPKNL Palopo sebesar **Rp 1,496,611,000**.

Realisasi penggunaan anggaran DIPA tahun 2023 secara terperinci adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Pagu setelah Revisi	Realisasi
<b>Jumlah Seluruhnya</b>	Rp 1,496,611,000	Rp 1,414,186,030
<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	Rp 224,131,000	Rp 180,797,057
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 7,416,000	Rp 3,443,500
2. Pengelolaan Aset	Rp 216,715,000	Rp 177,353,557
<b>Dukungan Manajemen</b>	Rp 1,272,480,000	Rp 1,233,388,973
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 6,528,000	Rp 6,528,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1,250,617,000	Rp 1,213,331,973
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 10,773,000	Rp 9,355,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 4,562,000	Rp 4,174,000



## BAB IV PENUTUP

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat diketahui sampai sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang telah direncanakan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait, mengenai pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Palopo serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis DJKN tahun 2020-2024.

Pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Palopo pada tahun 2023 secara umum dapat dikatakan baik dan dari target 20 IKU yang telah ditetapkan, hampir secara keseluruhan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **114,13%**.

Pencapaian ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Palopo untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja pada periode berikutnya. Hal tersebut juga sejalan dengan upaya KPKNL Palopo untuk mempersiapkan diri menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani untuk tahun 2025.

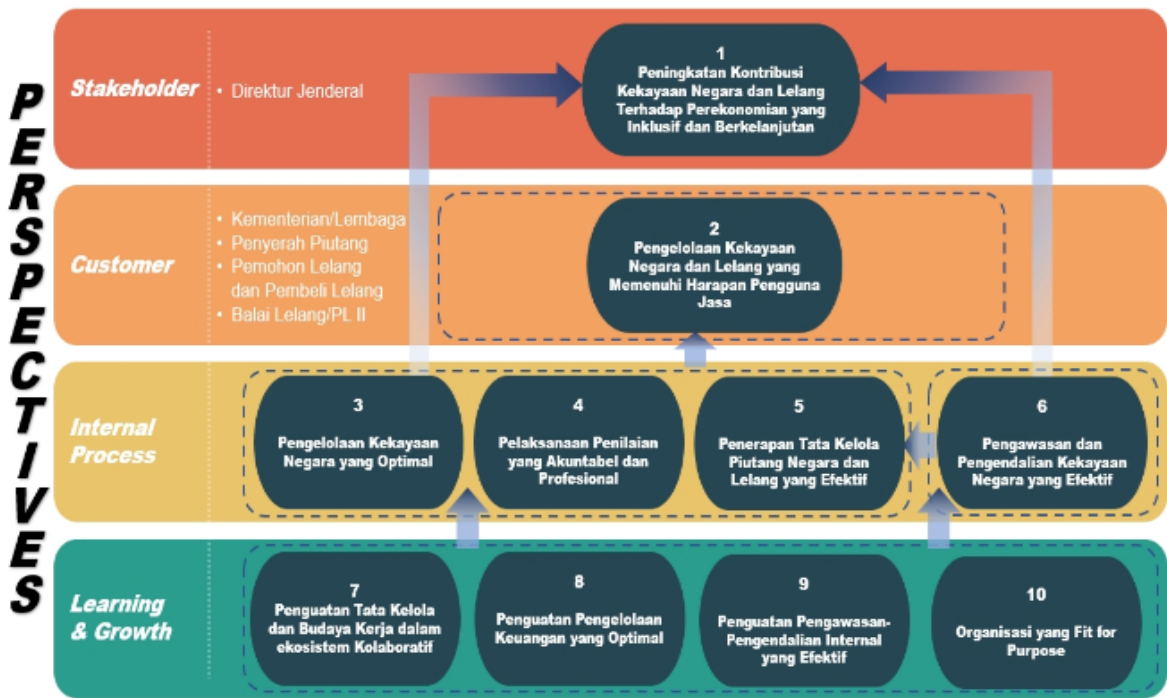
Penyusunan laporan kinerja ini diakui masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, KPKNL Palopo siap menerima masukan, saran maupun koreksi untuk segala perbaikan di masa yang akan datang.



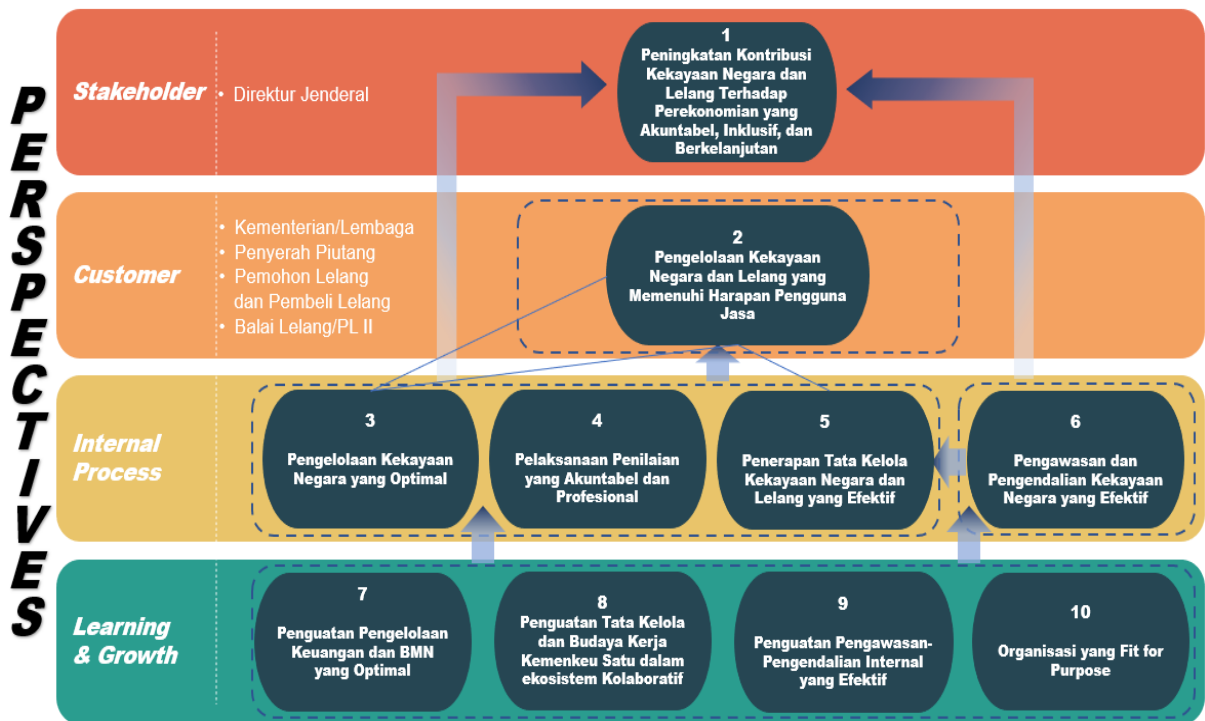
## ADENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-04A/WKN.15/2023

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-04/WKN.15/2023 tanggal 31 Januari 2023 , dengan rincian sebagai berikut:

**Peta Strategis sebelum adendum:**



**Peta Strategis setelah adendum:**



**a. Perubahan Nama Sasaran Strategis**

Sebelum		Menjadi	
Kode SS	Sasaran Strategis	Kode SS	Sasaran Strategis
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang <b>Akuntabel</b> , Inklusif, dan Berkelanjutan
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5	Penerapan Tata Kelola <b>Kekayaan</b> Negara dan Lelang yang Efektif
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	7	Penguatan Pengelolaan Keuangan <b>dan BMN</b> yang Optimal
8	Penguatan tata kelola dan budaya kerja dalam ekosistem kolaboratif	8	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

**b. Perubahan Nama IKU**

Sebelum		Menjadi	
Kode IKU/Sub-IKU	Sasaran Strategis	Kode IKU/Sub-IKU	Sasaran Strategis
6a-CP	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara
6b-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

**c. Reposisi IKU antar Sasaran Strategis**

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d Q3	Q4	Y			Q3	s.d Q3	Q4	Y
<i>Internal process perspective</i>						<i>Learning and growth perspective</i>					
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif					7	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				
5c-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	7b-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%
<i>Internal process perspective</i>						<i>Internal process perspective</i>					
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif					5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				
6b-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100 %	100 %	5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100 %	100%
<i>Learning and growth perspective</i>						<i>Stakeholder perspective</i>					
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan				
9a-CP	Indeks Integritas	-	-	-	88,67	1c-CP	Indeks integritas	-	-	-	88,67

#### d. Penghapusan IKU

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
9b-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	IKU dihapus dari Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo nomor PK-04/WKN.15/2023.

#### e. Penambahan IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d Q3	Q4	Y			Q3	s.d Q3	Q4	Y
						<i>Learning and Growth</i>					
-	-	-	-	-	-	7c-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%

#### f. Perubahan Trajectory Target IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d Q3	Q4	Y			Q3	s.d Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80 %	80%	80%	80%
7a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	7a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100

#### g. Perubahan Kode IKU

Kode IKU		Indikator Kinerja Utama
Sebelum	Menjadi	
9c-N	9a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Palopo, Agustus 2023

Menyetujui,  
Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo

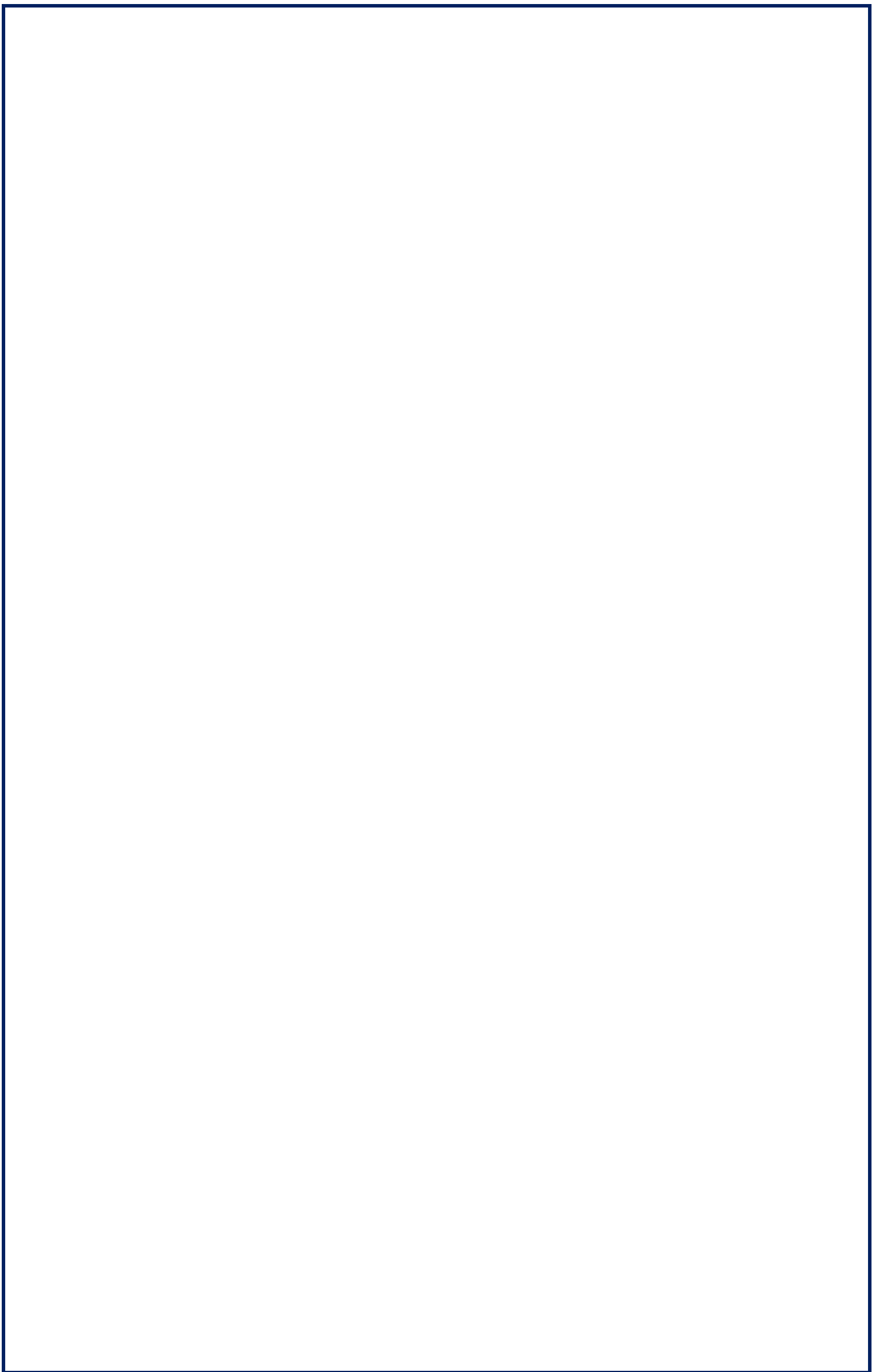


Ditandatangani Secara Elektronik  
Arif Bintarto Yuwono



Ditandatangani Secara Elektronik  
Naf'an Widiarso Rafid





SASARAN KINERJA PEGAWAI PENDEKATAN HASIL KERJA  
KUANTITATIF

BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN : 1 Juli s.d. 31 Desember 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA			
NAMA	Naf'an Widiarso Rafid, S.S.T., Ak., M.B.A., Ph.D.	NAMA	Arif Bintarto Yuwono		
NIP	197408071995031001	NIP	197109121997031001		
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c		
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palopo	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat		
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat		
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
A. UTAMA					
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat)	IKI 1.1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	73,82%	Penerima Layanan
		IKI 1.2	Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan
		IKI 1.3	Indeks Integritas	88.67	Penerima Layanan
2.		IKI 2.1	Persentase Realisasi Pokok Lelang	60,65%	Penerima Layanan

	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat)	IKI 2.2	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	53,09%	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat)	IKI 3.1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	Proses Bisnis
		IKI 3.2	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	80,48%	Proses Bisnis
		IKI 3.3	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	50%	Proses Bisnis
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat)	IKI 4.1	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	Proses Bisnis
		IKI 4.2	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat)	IKI 5.1	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional	94%	Proses Bisnis
		IKI 5.2	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	Proses Bisnis
		IKI 5.3	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	19,61%	Proses Bisnis
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat)	IKI 6.1	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	Proses Bisnis
7.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat)	IKI 7.1	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		IKI 7.2	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	Penguatan Internal atau Anggaran
		IKI 7.3	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
8.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat)	IKI 8.1	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran

9.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat	IKI 9.1	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Organisasi yang Fit For Purpose (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat	IKI 10.1	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
<b>B. TAMBAHAN</b>					
1	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	IKI 1	Seluruh Pejabat Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan	90	Penguatan Internal

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi Pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang maupun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja</p>

	- Membangun lingkungan kerja yang kondusif	yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Naf'an Widiarso Rafid  
197408071995031001

Palopo, 27 September 2023

Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani secara elektronik

Arif Bintarto Yuwono  
197109121997031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Juli s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	21 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, inklusif dan berkelanjutan								
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	-	-	-	36,22%	36,22%	73,82%	73,82%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	-	-	-	80%	80%	80%	80%
1c-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88.67	88.67
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	-	-	30,65%	30,65%	60,65%	60,65%

2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	-	-	-	15,49%	15,49%	53,09%	53,09%
3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal								
3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	-	-	55%	55%	68%	68%
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	-	-	43,68%	43,68%	80,48%	80,48%
3c-CP	Persentase Penyelesaian BKPN	-	-	-	10%	10%	50%	50%
4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional								
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	-	-	-	25%	25%	25%	25%
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	-	-	-	70	70	70	70
5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif								
5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	-	-	94%	94%	94%	94%
5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	-	-	-	63%	63%	86%	86%
5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	-	-	14,71%	14,71%	19,61%	19,61%
6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif								
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	86%	86%
7. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal								
7a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100	100	100	100
7b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	-	-	-	15%	15%	15%	15%

7c-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	100%	100%
8. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif								
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	-	-	-	75%	75%	100%	100%
9. Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif								
9a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	-	-	60	60
10. Organisasi yang <i>fit for Purpose</i>								
10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik

Naf'an Widiarso Rafid



